



Pemetaan Kemiskinan Berbasis Wilayah dan Budaya Lokal: Review Kritis atas Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)"

Abdul Aziz Pratama¹, Zahratul Aini² Sahril Gunawan³

^{1,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia.

² kedokteran, universitas Muhammadiyah purwokerto, Indonesia.

abdulazizpratama15@gmail.com

Received: Desember 05, 2023

Accepted: Februari 11, 2024

Published: Maret 25, 2024

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis efektivitas program penanggulangan kemiskinan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), dengan fokus pada pemetaan kemiskinan berbasis wilayah dan budaya lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis multidimensi terhadap kemiskinan, yang mencakup aspek spasial, ekonomi, dan kultural secara terintegrasi. Data diperoleh dari database Dimensions dan Scopus dengan rentang publikasi tahun 2020–2025, menggunakan kriteria inklusi ketat terhadap artikel ilmiah bereputasi dan relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa banyak program masih bersifat sentralistik dan homogen, tanpa mempertimbangkan konteks lokal yang khas pada wilayah 3T. *Novelty* dari studi ini terletak pada sintesis interdisipliner yang menghubungkan desain kelembagaan, validitas data kependudukan, dan partisipasi berbasis kearifan lokal dalam menilai keberhasilan program. Hasil kajian ini berkontribusi secara teoritik dalam membingkai kemiskinan sebagai fenomena kontekstual dan multidimensi, serta memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan sosial. Penelitian ini juga merekomendasikan arah riset selanjutnya untuk membangun model pemetaan kemiskinan berbasis komunitas yang mengintegrasikan teknologi geospasial dan instrumen partisipatif lokal.

Keywords kemiskinan 3T, budaya lokal, pemetaan spasial, kebijakan sosial

A. Pendahuluan

Konsep “tempat tertinggal” menyoroti perlunya pemahaman yang lebih bernuansa tentang ketidaksetaraan geografis dan beragam tantangan yang dihadapi oleh komunitas yang berbeda (Pike et al., 2024). Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia merupakan kategori wilayah yang secara struktural mengalami kesenjangan dalam akses sumber daya, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik dasar. Ketertinggalan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor jarak geografis semata, tetapi juga oleh absennya pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan konteks lokal secara menyeluruh. Oleh karena itu, kajian terhadap kemiskinan di daerah 3T memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap wilayah, dengan mempertimbangkan kompleksitas historis, geografis, dan sosial budaya setempat.

Kemiskinan regional sering dikaitkan dengan kondisi geografis dan ekonomi. Penelitian telah menunjukkan bahwa situasi geografis suatu wilayah, bersama dengan kondisi ekonominya, secara signifikan berdampak pada tingkat kemiskinan (Motaghi et al., 2023). Wilayah dengan keterbatasan akses transportasi, minimnya infrastruktur penunjang, dan lemahnya aktivitas ekonomi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa dimensi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks spasial dalam menganalisis kemiskinan. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang berbasis pada data spasial dan sosial-ekonomi menjadi penting untuk menjawab akar masalah kemiskinan yang multidimensional, terutama di wilayah 3T.

Kemiskinan sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi utama, yakni moral, material, dan sosial. Dimensi moral mencerminkan perasaan tidak berdaya atau kehilangan martabat, dimensi material terkait dengan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, sementara dimensi sosial berkaitan dengan keterasingan dari kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif (Siziba & Mapuva, 2023). Pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga dimensi ini sangat penting, terutama dalam konteks daerah 3T, karena pendekatan kebijakan yang bersifat universal sering kali gagal merespons kondisi nyata dan beragamnya penyebab kemiskinan di tingkat lokal.

Beberapa inovasi kebijakan telah mencoba mengintegrasikan pendekatan ekonomi dan sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satunya terlihat dalam program “Gercep Gaskan Berdaya” di Sulawesi Tengah yang mengombinasikan bantuan uang tunai dengan pelatihan kewirausahaan.

Hasil evaluasi program menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pendapatan rumah tangga penerima manfaat, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemberian dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi lokal melalui pelatihan dan pendampingan (Astuti, 2024). Pendekatan ini menjadi penting bagi wilayah 3T yang selama ini bergantung pada bantuan langsung tunai tanpa penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

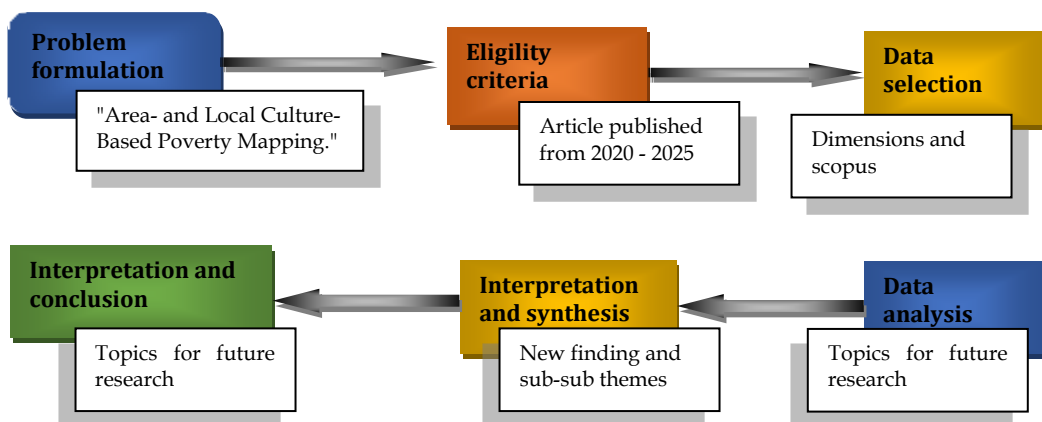
Selain dimensi ekonomi, integrasi budaya lokal juga menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan, termasuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sebuah studi di Kolombia menunjukkan bahwa integrasi budaya lokal ke dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di sekolah pedesaan secara signifikan meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Pendekatan ini memadukan unsur budaya regional dan teknologi pembelajaran, menghasilkan partisipasi yang lebih aktif dan keterlibatan yang lebih mendalam dalam proses Pendidikan (Ospina et al., 2024). Hal ini mengisyaratkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di daerah 3T akan lebih efektif jika disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa pendekatan penanggulangan kemiskinan yang efektif di wilayah 3T seharusnya mencakup pemahaman multidimensi tentang kemiskinan, intervensi ekonomi berbasis pelatihan, serta integrasi nilai budaya lokal. Gap utama yang ditemukan dalam berbagai program yang ada adalah kecenderungan pendekatan yang seragam dan sentralistik, yang kurang mempertimbangkan konteks lokal dari wilayah tertinggal. Novelty dari penelitian ini terletak pada eksplorasi interdisipliner yang menggabungkan dimensi spasial, ekonomi, dan kultural dalam menilai efektivitas program pengentasan kemiskinan secara kritis melalui pendekatan *literature review*, dengan fokus spesifik pada daerah 3T. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah 3T melalui pendekatan *literature review* yang mempertimbangkan faktor wilayah dan budaya lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam memahami kemiskinan sebagai fenomena multidimensi yang kontekstual, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi perancang kebijakan dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang adaptif dan berbasis kearifan lokal. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan daerah yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan sosial.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan mengenai "Pemetaan Kemiskinan Berbasis Wilayah dan Budaya Lokal: Review Kritis atas Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)". Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database Dimensions (<https://app.dimensions.ai>) dan Scopus (<https://www.scopus.com>) dengan interval publikasi 5 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan dengan "Pemetaan Kemiskinan Berbasis Wilayah dan Budaya Lokal: Review Kritis atas Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)".

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas "Pemetaan Kemiskinan Berbasis Wilayah dan Budaya Lokal: Review Kritis atas Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)"; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2020-2025); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur penelitian

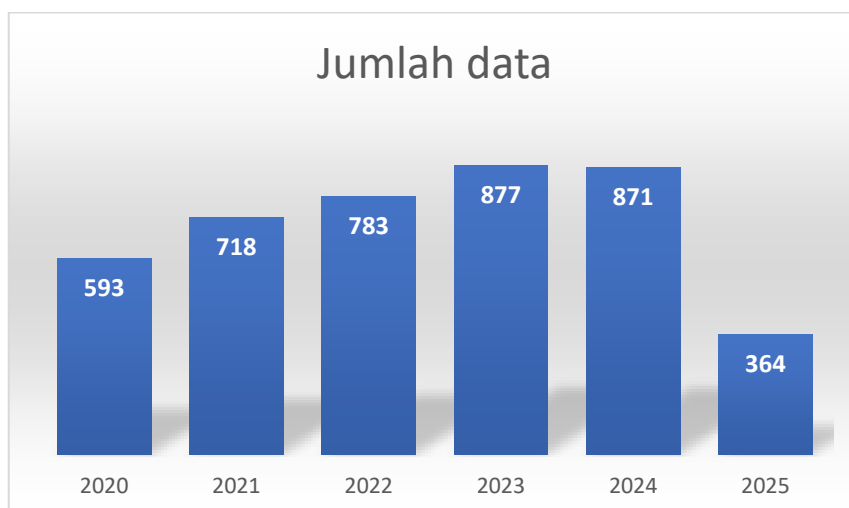
Gambar 1. Menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa

tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu "Pemetaan Kemiskinan Berbasis Wilayah dan Budaya Lokal: Review Kritis atas Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)". Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan seperti "(Kearifan local, Kebijakan daerah dan Penurunan angka kemiskinan) atau (Local wisdom, regional policies and Poverty reduction)". Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2020-2025). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam "Pemetaan Kemiskinan Berbasis Wilayah dan Budaya Lokal: Review Kritis atas Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)".

C. RESULTS AND DISCUSSION

1. Hasil Seleksi Data

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 229,508 data, meliputi data *open access* sebanyak 24,332 data dan sisanya adalah *close access*. Dari 24,332 data tersebut, terdapat 8,770 data merupakan artikel dan 15,562 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 8,770 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan Gambar 2.

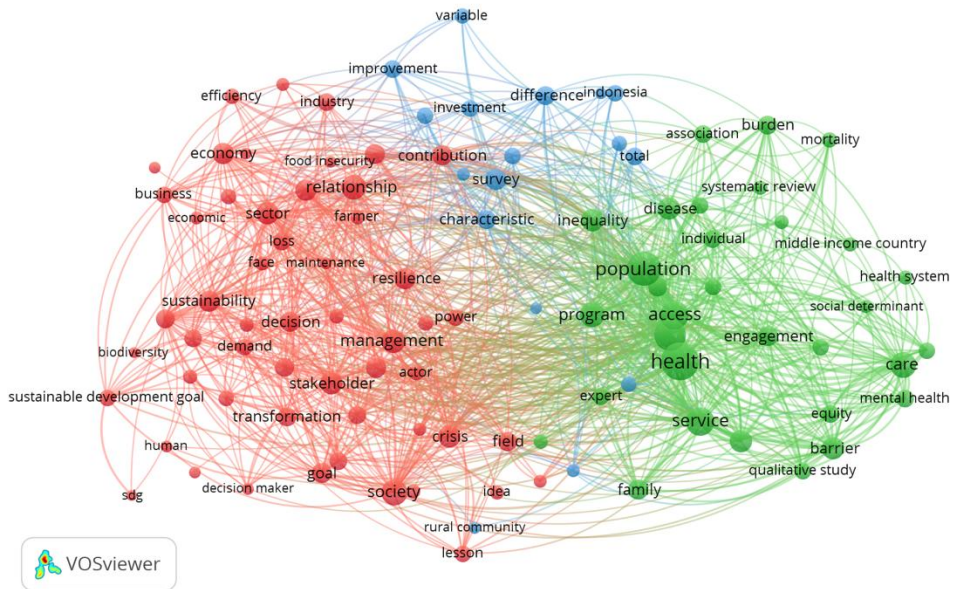


Gambar 2. Distribusi jumlah data selama 5 tahun terakhir

Gambar 2. Menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2023, terjadi tren peningkatan jumlah data yang konsisten dalam kajian terkait kemiskinan di wilayah 3T, yang mencerminkan meningkatnya perhatian akademisi dan pembuat kebijakan terhadap isu pembangunan di kawasan tertinggal, serta tersedianya lebih banyak data sekunder dan hasil survei sebagai indikasi akselerasi dokumentasi dan transparansi data publik. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah data mencapai sekitar 900 entri, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pelaksanaan program nasional seperti SDGs Desa, evaluasi akhir RPJMN 2020–2024, serta meningkatnya dorongan riset berbasis data dalam konteks pemulihan pasca-pandemi dan transisi kebijakan pemerintahan. Namun demikian, tahun 2025 menunjukkan penurunan tajam hingga hanya sekitar 350 data, yang dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari keterlambatan atau stagnasi pengumpulan dan publikasi data, perubahan kebijakan nasional atau desentralisasi sistem informasi, serta adanya *time lag* dalam distribusi data akademik maupun kelembagaan. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan adanya intensifikasi aktivitas riset dan dokumentasi data kemiskinan pada periode 2020–2023, dengan dinamika penurunan yang dapat dimaknai sebagai bagian dari siklus kelembagaan dan pergeseran orientasi kebijakan nasional.

2. Network Visualization of Data

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Network visualization dari variabel penelitian

Gambar 3 merupakan visualisasi jaringan dari seluruh variabel yang telah dikaji selama 5 tahun terakhir dan menggambarkan tiga kelompok warna yang berbeda: hijau, merah dan biru. Interpretasi dari masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut

- a. **Klaster Merah: Pembangunan Berkelanjutan dan Manajemen Sosial-Ekonomi**

Klaster ini menggambarkan keterkaitan antara pengelolaan sumber daya (management), pembangunan berkelanjutan (sustainability), dan peran pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi. Fokus utamanya adalah bagaimana **transformasi sektor ekonomi pedesaan** dan keterlibatan **aktor lokal** (farmer, rural community) dapat meningkatkan **resiliensi** masyarakat terhadap krisis (crisis, loss) dan mencapai **tujuan pembangunan berkelanjutan** (SDG).

- b. **Klaster Hijau: Determinan Kesehatan, Akses Layanan, dan Beban Sosial**

Klaster ini menjelaskan dimensi **determinasi sosial terhadap kesehatan** dalam konteks populasi miskin dan marjinal, khususnya pada wilayah 3T. Fokusnya adalah **akses terhadap layanan kesehatan dasar**, hambatan struktural (barrier), **kesenjangan pelayanan**, dan **beban penyakit** yang memperburuk kondisi kemiskinan struktural.

Pendekatan yang digunakan meliputi kajian sosial-epidemiologis dan **kebijakan kesehatan berbasis keadilan sosial** (equity, social determinant, engagement).

c. **Klaster Biru: Metodologi, Survei dan Variabel Kontekstual**

Klaster ini mewakili pendekatan **empiris-kuantitatif** dalam studi kemiskinan. Kata kunci seperti *survey*, *variable*, dan *characteristic* menunjukkan penggunaan instrumen statistik untuk membedakan kondisi populasi, mengukur kontribusi intervensi (program/pembangunan), serta memahami variabilitas antar wilayah seperti Indonesia. Ini juga memperlihatkan pentingnya *evidence-based policy* dan analisis *difference across contexts* dalam perencanaan intervensi yang efektif.

Berdasarkan pembagian klaster, peneliti dapat melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap beberapa topik sebagai berikut.

a. **Konfigurasi Wilayah 3T dan Karakteristik Budaya Lokal dalam Dinamika Kemiskinan**

Integrasi antara indikator sosial ekonomi dan data spasial terbukti penting dalam menilai standar hidup serta sistem jaminan sosial masyarakat, khususnya sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih strategis dan kontekstual (Ospan et al., 2022). Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan pemanfaatan platform berbasis data telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan publik dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan-kawasan yang sebelumnya terisolasi (Novikova, Z., Stenyashina, 2021). Konsep pembangunan berbasis data dan teknologi ini memperluas cakupan intervensi kemiskinan dengan mempertimbangkan elemen spasial dan kualitas layanan sebagai komponen fundamental pembangunan wilayah.

Di Indonesia, pendekatan berbasis budaya lokal menjadi kunci dalam menanggulangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan struktural. Warisan budaya dan pengetahuan tradisional memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan kohesi sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput (Nizar et al., 2024). Sebagai contoh, penelitian di Desa Sade, Kabupaten Lombok Tengah, menunjukkan bahwa strategi berbasis kearifan lokal seperti penguatan industri kreatif lokal, pemanfaatan potensi pariwisata berbasis budaya, serta peningkatan akses pendidikan dan pelatihan

keterampilan mampu menciptakan transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Sucipto et al., 2024). Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan menjadi faktor utama keberhasilan pendekatan ini.

Interpretasi dari temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks **wilayah 3T**, integrasi antara data spasial, teknologi digital, dan kearifan lokal tidak hanya memperbaiki dimensi fisik aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan kohesi sosial dan efektivitas program pengentasan kemiskinan. **Konfigurasi wilayah 3T** yang secara geografis terpencil dan secara budaya beragam membutuhkan pendekatan multidimensional yang menggabungkan pemetaan kebutuhan berbasis wilayah dengan penguatan kapasitas lokal berbasis budaya. Dengan demikian, dinamika kemiskinan tidak cukup dipahami hanya dari aspek ekonomi atau demografi semata, tetapi harus dipertimbangkan melalui lensa sosial-kultural dan spasial yang saling berkelindan, untuk menjamin keadilan pembangunan dan keberlanjutan intervensi kebijakan.

b. Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah 3T

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan pemerintah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin, ditunjukkan oleh peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat yang mencapai dua kali lipat selama proses penyaluran (Faradilla et al., 2024). Namun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada keakuratan data kependudukan di tingkat desa, sehingga diperlukan mekanisme pemutakhiran data secara berkala, idealnya setiap bulan. Ketepatan data akan memastikan bahwa sasaran program tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial ekonomi yang terus berubah di tingkat komunitas.

Dalam kerangka kelembagaan, pentingnya desain institusional yang kohesif dan responsif menjadi penentu sejauh mana kebijakan publik dapat diterjemahkan secara efektif dalam praktik. Sebagaimana dinyatakan oleh LaCombe (2023), struktur kelembagaan agregat yang solid memungkinkan sentimen publik dan kebutuhan lokal diartikulasikan ke dalam kebijakan yang dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat akuntabilitas. Namun, terdapat pula hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan, baik yang bersumber dari kompleksitas regulasi pemerintah maupun rendahnya kesadaran pelaksana di lapangan (Ali, 2024). Dalam konteks tertentu, kebijakan kelembagaan justru dapat membebani pelaksana program dan menciptakan resistensi terhadap adopsi

pendekatan baru, terutama bila tidak didukung oleh kesiapan kapasitas sumber daya manusia.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa efektivitas program penanggulangan kemiskinan di wilayah 3T sangat ditentukan oleh tiga elemen kunci: (1) validitas data kependudukan yang mendukung ketepatan sasaran intervensi, (2) desain kelembagaan yang memungkinkan respons adaptif terhadap dinamika lokal, serta (3) kesiapan struktural dan kultural dari pelaksana program di lapangan. Di wilayah 3T yang umumnya menghadapi keterbatasan infrastruktur administratif, kelembagaan yang lemah dan rendahnya literasi kebijakan, efektivitas program seperti PKH akan terhambat bila tidak disertai dengan sistem monitoring yang terdesentralisasi dan pemberdayaan kelembagaan desa. Dengan demikian, keberhasilan intervensi tidak hanya bertumpu pada keberadaan program, tetapi juga pada kesiapan institusi lokal dan keberlanjutan sistem tata kelola sosial yang mendukung program tersebut secara aktif.

c. Pemetaan Multidimensional Kemiskinan Berbasis Wilayah dan Budaya Lokal

Penanggulangan kemiskinan di daerah seperti Sumbawa membutuhkan pendekatan yang bersifat holistik, dengan memperhatikan dimensi ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial secara simultan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan (Pratama, 2023). Penguatan sistem sosial dan ekonomi lokal tidak dapat dipisahkan dari konteks wilayah dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Sementara itu, inovasi dalam pemetaan kemiskinan berbasis data spasial mulai menunjukkan relevansi tinggi dalam mendukung perencanaan kebijakan yang tepat sasaran. Sebagai contoh, di Jawa Timur, Indeks Kemiskinan Spasial Relatif (RSPI) yang dikembangkan dengan menggunakan variabel seperti Night Time Light (NTL), indeks terbangun, dan kepadatan titik minat, terbukti berkorelasi erat dengan data kemiskinan resmi (Putri et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan data spasial dengan indikator sosial ekonomi mampu menghasilkan representasi yang lebih akurat tentang distribusi kemiskinan.

Studi di negara maju juga menunjukkan efektivitas pendekatan kartografis dalam mengungkap dinamika spasial kemiskinan. Di Inggris, pemetaan kekurangan dengan menekankan karakteristik lingkungan lokal dan struktur spasial terbukti mampu mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan tersembunyi yang

tidak terdeteksi oleh indikator konvensional (Radburn & Beecham, 2021). Demikian pula, pemanfaatan peta kemiskinan beresolusi tinggi di Nigeria telah meningkatkan efektivitas penargetan geografis program bantuan sosial, yang mengindikasikan nilai praktis dari integrasi data geospasial ke dalam kebijakan kesejahteraan (Smythe & Blumenstock, 2022). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa dimensi spasial bukan hanya pelengkap dalam analisis kemiskinan, melainkan komponen esensial dalam upaya mendekatkan intervensi sosial kepada populasi yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemetaan multidimensional kemiskinan berbasis wilayah dan budaya lokal menjadi pendekatan yang sangat strategis untuk meningkatkan akurasi pengetahuan tentang distribusi dan karakteristik kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, khususnya daerah 3T seperti Sumbawa, integrasi antara data spasial (misalnya citra satelit, infrastruktur, dan mobilitas), variabel sosial ekonomi, dan pemahaman budaya lokal akan menghasilkan sistem pemetaan yang lebih reflektif terhadap realitas masyarakat. Dengan pendekatan ini, strategi intervensi dapat diarahkan tidak hanya berdasarkan lokasi geografis, tetapi juga berdasarkan dinamika kultural dan pola interaksi sosial-ekonomi yang khas di setiap komunitas. Pemetaan semacam ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

D. CONCLUSION AND SUGGESTIONS

Dari berbagai temuan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan di wilayah 3T memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional dan kontekstual, yang mengintegrasikan data spasial, teknologi digital, serta kearifan lokal sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan program intervensi seperti PKH tidak hanya bergantung pada keberadaan program itu sendiri, tetapi juga pada validitas data kependudukan, desain kelembagaan yang responsif, serta kesiapan struktural dan kultural pelaksana di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemetaan kemiskinan yang menggabungkan indikator geografis, sosial ekonomi, dan budaya lokal merupakan strategi penting untuk memastikan keadilan distribusi, efektivitas kebijakan, dan keberlanjutan program pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal. Urgensi riset ke depan perlu diarahkan pada pengembangan model pemetaan kemiskinan berbasis komunitas yang mengintegrasikan teknologi geospasial dengan instrumen partisipatif, serta pengkajian kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola dan menyerap program penanggulangan kemiskinan secara adaptif di wilayah 3T.

Daftar Pustaka

- Ali, R. (2024). How challenging? Barriers for teachers in institutional implementation of blended learning. *Open Learning*, 40(3), 324–341. <https://doi.org/10.1080/02680513.2024.2342922>
- Astuti, D. (2024). *Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Konvergensi dan Inovasi Program*. 3(3), 355–363. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.4123>
- Faradilla, I., Putra, M. A. R., & Pratama, I. N. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lombok Timur. ... *Nasional Lppm Ummat*, 13. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/23726%0Ahttps://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/download/23726/9621>
- LaCombe, S. J. (2023). Institutional Design and Policy Responsiveness in US States. *American Politics Research*, 51(2), 210–222. <https://doi.org/10.1177/1532673X221135554>
- Motaghi, A., Motaghi, S., & Pletnev, D. (2023). Geography of poverty at the international level (comparative approach). *E3S Web of Conferences*, 376. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337605062>
- Nizar, N. I., Nuryartono, N., Juanda, B., & Fauzi, A. (2024). Can Knowledge and Culture Eradicate Poverty and Reduce Income Inequality? The Evidence from Indonesia. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(2), 6425–6450. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01398-3>
- Novikova, Z., Stenyashina, N. & N. (2021). "Vectors of socio-economic development of the region in the context of digital transformation." 436754837, 238–247.
- Ospan, A. G., Mansurova, M. E., Kakimzhanov, Y. K., Ixanov, S. S., & Barakhnin, V. B. (2022). Development of a program for the integration of socio-economic indicators with spatial data to analyze the standard of living of the population of kazakhstan. *Bulletin of the National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan*, 85(3), 67–78. <https://doi.org/10.47533/2020.1606-146x.170>
- Ospina, S. C., Fernanda, L., Martinez, R., Fernanda, L., & Martinez, R. (2024). *INTEGRATING CULTURE AND TECHNOLOGY IN THE ENGLISH LANGUAGE LEARNING PROCESS*.
- Pike, A., Béal, V., Cauchi-Duval, N., Franklin, R., Kinossian, N., Lang, T., Leibert, T., MacKinnon, D., Rousseau, M., Royer, J., Servillo, L., Tomaney, J., & Velthuis, S. (2024). 'Left behind places': a geographical etymology. *Regional Studies*, 58(6), 1167–1179. <https://doi.org/10.1080/00343404.2023.2167972>
- Pratama, I. N. (2023). Dinamika Kemiskinan di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir. *Seminar*

- Nasional LPPM UMMAT*, 2(April), 1216–1222.
- Putri, S. R., Wijayanto, A. W., & Sakti, A. D. (2022). Developing Relative Spatial Poverty Index Using Integrated Remote Sensing and Geospatial Big Data Approach: A Case Study of East Java, Indonesia. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 11(5).
<https://doi.org/10.3390/ijgi11050275>
- Radburn, R., & Beecham, R. (2021). Mapping deprivation for each and every small area in England. *Regional Studies, Regional Science*, 8(1), 269–272.
<https://doi.org/10.1080/21681376.2021.1934528>
- Siziba, E., & Mapuva, J. (2023). Towards a Reconceptualization of Poverty: Implications for Its Eradication and Policy. *Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, 9(1), 34–45.
<https://doi.org/10.55327/jaash.v9i1.299>
- Smythe, I. S., & Blumenstock, J. E. (2022). Geographic microtargeting of social assistance with high-resolution poverty maps. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 119(32), 1–10.
<https://doi.org/10.1073/pnas.2120025119>
- Sucipto, A., Budiman, B., Phitaloka, T. I., & Pratama, I. N. (2024). *Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Kearifan Lokal di Kabupaten Lombok Tengah*. 22, 485–495.
